

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**BIRO HUKUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**2021-2026**

1. Nama : Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat

2. Tugas Pokok : “Menyiapkan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Peraturan Perundang-Undangan Provinsi, Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten/Kota dan Bantuan Hukum.”

Fungsi : a. Penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang Peraturan Perundang-Undangan Provinsi, Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten/Kota dan Bantuan Hukum;  
b. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Peraturan Perundang-Undangan Provinsi, Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten/Kota dan Bantuan Hukum;  
c. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Peraturan Perundang-Undangan Provinsi, Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten/Kota dan Bantuan Hukum; dan  
d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

## Indikator Kinerja Utama

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	BASELINE	FORMULA/SUMBER DATA CAPAIAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Produk Hukum Daerah Yang Diselesaikan	Persentase Produk Hukum Daerah Yang Diselesaikan	<p>Target awal sebanyak 15 Perda diperoleh dari usulan awal Propemperda (bersama DPRD) sebanyak 19 Ranperda dan sinkronisasi dengan RPJMD. Karena keterbatasan waktu pada tahapan penyelesaian (fasilitasi kemendagri), maka diperlukan perubahan target menjadi 10 Perda</p> <p>Target awal sebanyak 85 Pergub, yang pembahasannya melibatkan Kanwil Hukum dan HAM dalam tahapan harmonisasi,</p>	<p>(Realiasi jumlah produk hukum daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan kepentingan umum )</p> <hr/> <p>(Target jumlah produk hukum daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan kepentingan umum )</p> <p style="text-align: right;"><b>X 100%</b></p>	<p>Perda <math>(7/10) \times (100\%) = 70\%</math>  Pergub <math>(39/60) \times (100\%) = 65\%</math>  Keputusan Gubernur <math>(1083/750) \times (100\%) = 144.4\%</math></p> <p>Draft Produk Hukum Daerah kab/kota <math>(136/60) \times (100\%) = 226.6\%</math>  Ranperda Kab/Kota <math>(25/20) \times (100\%) = 125\%</math>  Perda kab/kota <math>(0/3) \times (100\%) = 0</math>  Pert KDH dan DPRD <math>(2/5) \times (100\%) = 40\%</math></p>

			<p>pembulatan dan konsepsi, membutuhkan proses penyelesaian yang membutuhkan waktu, sehingga diperlukan perubahan target menjadi 60 Pergub.</p> <p>Target Keputusan Gubernur sebanyak 750, berpedoman pada target penyelesaian Keputusan Gubernur pada tahun sebelumnya. Namun karena penyusunan Kepgub bersifat fluktuatif, maka targetnya tetap (tidak ada perubahan)</p> <p>Target Ranperda, Ranperkada, Perda dan Peraturan DPRD Kab/Kota yang difasilitasi dan dievaluasi ditetapkan</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>sebanyak target yang disajikan pada dokumen perencanaan, dengan sumber data berasal dari usulan bagian hukum kab/kota pada tahun sebelumnya. Berkurang atau bertambahnya target berdasarkan usulan yang masuk pada tahun berjalan untuk difasilitasi dan dievaluasi oleh Biro Hukum.</p>		
2.	Meningkatnya Akses Keadilan dan Pelayanan Hukum Bagi Pemerintah dan Masyarakat	1. Persentase Penanganan Perkara yang Diselesaikan	<p>Target awal penanganan perkara sebanyak 7 Perkara, berpedoman pada penanganan perkara yang diselesaikan tahun sebelumnya dan berkemungkinan berlanjut pada tahun berikutnya, sedangkan tambahan perkara pada tahun</p>	<p>( Realisasi jumlah perkara sengketa hukum yang diselesaikan )</p> <hr/> <p>(Target jumlah perkara sengketa hukum yang ditetapkan )</p> <p style="text-align: right;"><b>✘ 100%</b></p>	Perkara (24/10)*(100%) = 240%.

		<p>berjalan, memerlukan perubahan target menjadi 10 Perkara.</p> <p>2. Persentase Bantuan Hukum yang Diselesaikan</p>	<p>Target bantuan advokasi hukum bagi masyarakat miskin sebanyak 5 bantuan, yang datanya bersumber dari usulan proposal LBH terakreditasi oleh KemenkumHAM ke Biro Hukum. Idealnya sebanyak 12 bantuan, namun targetnya disesuaikan dengan alokasi anggarannya</p>	<p>( Jumlah masyarakat miskin yang mendapat pendanaan bantuan hukum )</p> <hr/> <p>( Jumlah masalah hukum bagi masyarakat miskin yang diajukan oleh OBH untuk mendapatkan</p> <p style="text-align: right;"><b>× 100%</b></p>	<p>Bantuan hukum 5/5*100% =100%</p>
--	--	---	--	---	-------------------------------------

**KEPALA BIRD HUKUM**



**EZEDDIN ZAIN, S.H., M.E.**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19741031 199803 1 004**